

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran organisasi internasional saat ini merupakan warisan dari usainya peperangan pada abad ke 20 lalu, dimana Organisasi internasional tumbuh dan berkembang pesat usai perang dunia II yang ditandai dengan kemunculan-kemunculan komunitas supranasional yang bertugas untuk menciptakan perdamaian Dunia usai peperangan. Dimana kemunculan organisasi internasional saat itu telah menyebabkan terjadinya pergeseran pada fokus kajian internasional, yang dulu mengarah pada *Tradisional Issues* yang lebih melihat negara dari kacamata power, kekuatan militer dan *Security Alliance* nya. Namun sekarang lebih condong kearah *Non-Tradisional Issues* yang berorientasi pada kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Perubah ini dikarenakan adanya metafora dari politik global yang terus bergerak dinamis yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan pemikiran optimistik terhadap pembentukan dunia yang lebih damai dengan mengutamakan kerjasama internasional daripada melakukan ekspansi militer demi mencapai suatu kepentingan semata.

Kehadiran organisasi internasional belakangan ini menjadi tolak ukur akan perkembangan dari suatu kawasan atau komunitas internasional dalam kancan politik global. Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional itu sebagai suatu struktur formal, berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan antara anggota-anggotanya, apakah itu pemerintah atau bukan yang berjumlah paling tidak

dua negara merdeka dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota-anggotanya. (Archer, 2001 : 33)

Tidak dapat dipungkiri, bahwa latar belakang dibentuknya suatu organisasi internasional memang selalu bermotif pada suatu kepentingan tertentu yang hendak dicapai oleh para anggotanya, fenomena ini juga terdapat di PBB. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* memiliki tujuan utama yakni memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang dapat mengarah pada pelanggaran perdamaian. (<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>-diakses pada 18/06/2020 - 10.51 WIB)

Dimana PBB selalu mengedepankan proses penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dengan memperhatikan dampak yang akan dihasilkannya. Dalam proses penyelesaian konflik saat ini PBB menggunakan 3 tahapan resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung yakni : *Peacekeeping*, menghentikan konflik dengan menghadirkan intervensi militer yang bersifat netral contohnya Misi UN-PKO. *Peacemaking*, ialah sebuah strategi yang menjembatani komunikasi antar pihak yang berkonflik, contohnya dilakukannya perjanjian tertulis yang melibatkan pihak mediator/negara lain.

Peacebuilding, merupakan upaya implementasi yang mengarah pada perubahan dan rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi. Dimana melalui proses *Peacebuilding* ini diharapkan *Negative Peace/The Absence Of Violence* dapat berubah menjadi masyarakat yang merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Bila diturunkan dari ketiga tahapan ini maka *Peacemaking* dan *Peacekeeping* dibutuhkan untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian, dimana jika kondisi tersebut telah tercapai, maka keduanya akan memperkuat kesempatan untuk *Peacebuilding* pasca konflik yang mana dapat mencegah kemunculan kembali kekerasan di antara individu dan negara.

Namun perlu digaris bawahi saat ini proses *Peacebuilding* menjadi perhatian PBB dalam upaya pemulihan wilayah yang sedang berkonflik terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika karena mengingat bahwa sudah saatnya perdamaian harus diupayakan.

Dalam hal mencapai misi penciptaan perdamaian dan keamanan dunia, PBB memiliki badan khusus yang membidangi isu keamanan yang kenal dengan Dewan Keamanan PBB (DK) atau *United Nations Security Council* (UNSC). Dimana DK PBB ini merupakan badan yang paling layak menjalankan intervensi militer untuk tujuan melindungi manusia. (Pattison, 2006 : 262) Dimana DK PBB melakukan misi penjagaan keamanan dan perdamaian global melalui fungsinya sebagai *Peace Settlement* yakni *Peacemaking*, *Peacekeeping* dan *Peacebuilding*.

Dewan Keamanan merupakan organ vital PBB yang bertugas dalam penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan merupakan satu dari

enam organ utama PBB yang hingga saat ini masih aktif dalam melaksanakan tugasnya, dimana badan ini merupakan institusi yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam PBB bahkan ketimbang Majelis Umum PBB sekalipun. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota yang lima diantaranya ialah anggota tetap yakni, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat China, sedangkan 10 nya lagi merupakan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. (Ambarwati, 2016 : 203)

Jatah Kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terdistribusikan menurut prinsip-prinsip piagam PBB dan persetujuan aturan-aturan tertentu. Misalnya, dalam piagam ditentukan bahwa suatu negara yang telah terpilih untuk masa dua tahun, tidak mudah untuk kembali terpilih lagi. Untuk jatah 10 kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB didistribusikan sebagai berikut, lima kursi untuk Asia dan Afrika, dua kursi untuk Amerika latin, satu kursi untuk Eropa Timur, dua kursi untuk Eropa Barat. (Ambarwati, 2016 : 203)

Pada tahun 2018 lalu di markas besar PBB New York, Dewan Keamanan PBB kembali membuka pemilihan untuk keanggotaan tidak tetap yang baru. Dimana pada saat itu setelah dilakukan pemungutan suara maka didapatkanlah hasil yang mengumumkan bahwa Indonesia berhasil kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Indonesia juga akan ditemani oleh Jerman, Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, Kuwait, dll. Dimana Indonesia telah memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020. Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-empat kalinya,

setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

(https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-Indonesia-pada-dk-pbb (Diakses pada 18/04/2020 - 16.12 WIB)

Berhasil terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan akhir dari rintitan panjang, usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri semenjak tahun 2016 lalu, dengan pertimbangan jika menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat semakin menunjukkan eksistensi peranannya di tingkat kawasan dan global yang selaras dengan prioritas politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam amanah UUD 1945 yakni pada alinea ke-empat, yang berbunyi : (Rezasyah, 2019 :139)

“.... Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam masa jabatan 2019-2020 merupakan bentuk dari kepercayaan masyarakat internasional atas kinerja Indonesia dalam upaya penciptaan perdamaian dan keamanan internasional. Menurut Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi, terpilihnya Indonesia di kancah Internasional merupakan capaian dari adanya kerja keras dari seluruh komponen bangsa, khususnya para diplomat Indonesia yang secara intensif melakukan lobi di berbagai forum internasional.

Berdasarkan lobi yang dilakukan diplomat Indonesia untuk pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setidaknya terdapat tiga jenis dukungan yang didapatkan yakni : (Hidriyah, 2018 : 8)

1. Dukungan yang bersifat Unilateral yakni dukungan yang diberikan suatu negara terhadap Indonesia tanpa ada syarat timbal balik.
2. Dukungan yang bersifat Timbal Balik, maksudnya Indonesia akan mendukung suatu negara untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di suatu badan internasional, sebaliknya negara tersebut akan mendukung Indonesia untuk pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
3. Dukungan secara Lisan, dimana dukungan ini berbentuk janji yang diucapkan oleh beberapa negara di forum internasional untuk membantu Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa, terpilihnya Indonesia merupakan kerja keras panjang para diplomat Indonesia. Dimana isu pencalonan Indonesia selalu diangkat oleh presiden Jokowi dalam setiap pertemuan dengan kepala negara sahabat. Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa Indonesia harus melakukan kampanye yang bersih dalam setiap pencalonan termasuk pencalonan Dewan Keamanan PBB. Dimana dalam proses pencalonan Indonesia lebih mengedepankan rekam jejak dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB yakni dengan mencanangkan tema “Mitra Sejati untuk Perdamaian Dunia / *A True Partner For World Peace*. (Pidato Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi pada pembukaan

pameran foto “ *Investing In Peace*” di markas besar PBB tanggal 6 Mei 2019 (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 43))

Dalam pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019-2020, Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 isu Perhatian khusus, yakni : (https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-Indonesia-pada-dk-pbb (Diakses pada 18/04/2020 - 16.23 WIB)

1. Melanjutkan kembali kontribusi pemerintah RI dalam upaya nya mewujudkan perdamaian dunia, diantaranya melalui memperkuat ekosistem/geo-politik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai
2. Membangun sinergi antar organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peranan organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.
3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terorisme, ekstrimisme dan radikalisme.
4. Berupaya untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang diantaranya :
 - a. Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan agenda 2030, terutama di kawasan Afrika dan Timur Tengah

- b. Membentuk kemitraan global dalam membahas implikasi keamanan ekonomi, kesehatan dan lingkungan Hidup
- c. Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian

Disamping itu juga Indonesia memiliki isu khusus yang dibawa dalam setiap sidang di DK PBB, yakni Isu Palestina.

Selama menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia terus berjuang dalam menyuarakan suara negara berkembang dan negara yang tengah berkonflik. Pada bulan Mei 2019, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi Presidensi DK PBB. Dimana selama sebulan penuh Indonesia mendapat mandat untuk memimpin jalan sidang dan debat terbuka di DK PBB. (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/369/berita/melalui-presidensi-> Diakses pada 29/04/2021 - 15.39 WIB)

Presidensi Indonesia di DK PBB merupakan sebuah momen berharga bagi perkembangan diplomasi Indonesia. Sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat UUD 1945, melalui presidensi DK PBB ini akan semakin menunjukkan peranan Indonesia dalam memainkan kepemimpinan internasional untuk memimpin pembangunan dan memperkuat perdamaian global. Dalam momentum besar ini Indonesia kembali mengangkat Tema utama “*Investing Peace* /Menaburkan Benih Perdamaian”, Pemilihan tema ini didasarkan pada pandangan Indonesia bahwa perdamaian tidak tercipta dengan sendirinya, namun perlu dibangun, dirawat, dijaga dan dipertahankan. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 5)

Pemilihan Tema ini juga mengindikasikan akan konsern Indonesia dalam upaya pembentukan perdamaian dan keamanan dunia, terutama di wilayah yang sedang menghadapi konflik. Pemilihan tema ini juga merefleksikan rekam jejak Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan terbesar yakni nomor 8 dari 124 negara dengan 2080 personel ketika sidang berlangsung. Di samping itu, tema ini juga untuk menindaklanjuti inisiatif “*Action for Peacekeeping*” Sekretaris Jenderal PBB, termasuk Deklarasi Komitmen Bersama yang telah disahkan seluruh negara PBB pada September 2018, dimana Indonesia menjadi salah satu dari 10 *Core Country*. (Direktorat kerjasama Multilateral, 2019 : 16)

Selama menjabat sebagai presidensi DK PBB pada periode Mei 2019, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan 46 aktivitas yang terdiri dari 15 briefing terbuka, 14 konsultasi tertutup, 2 sidang terbuka tingkat Menteri, 3 Pertemuan *Arria-Formula*. Dimana dalam aktivitas tersebut banyak membahas tentang bagaimana upaya penciptaan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan Afrika. (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/355/berita/apresiasi-luas-untuk-presidensi-Indonesia-di-dewan-keamanan-pbb>) (Diakses pada 21/04/2021 - 11.30 WIB)

Selaras dengan diangkatnya tema besar “*Investing Peace*” dari 46 aktifitas diatas, Indonesia juga telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan utama yang menjadi *Signature Events* presidensi DK PBB Indonesia di bulan Mei, kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan 2 *Open Debate* mengenai misi penjagaan perdamaian PBB dan perlindungan warga sipil di wilayah konflik, Penyelenggaraan pertemuan *Arria-Formula* mengenai isu Palestina dan konflik di Timur Tengah, mengadakan kegiatan informal di PTRI New York yang dikenal dengan “*Sofa Talk*”

yang membahas isu-isu konflik di Timur Tengah terutama di Yaman. Penyelenggaraan pameran foto mengenai peranan Indonesia dalam bidang pertahanan serta resepsi diplomatik dan pertunjukan Budaya yang menampilkan tari Saman Gayo. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 14)

Selain itu Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk mengetuai sejumlah badan subsider DK PBB, yakni Komite 1267 (Al-Qaeda dan ISIL (Da'esh), komite 1988 (Taliban) dan Komite 1540 (Non-proliferasi). Dalam urusan kepemimpinan dan penyusunan resolusi yang menjadi Perhatian DK PBB, Indonesia berhasil memegang jabatan *Co-Penholdership* bersama Jerman dalam isu Afganistan serta menjadi *Co-Penholdership* bersama Amerika Serikat dan Kuwait dalam isu Palestina. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 14)

Jikalau kita perhatikan pada masa kepemimpinan Indonesia di bulan Mei, maka cenderung lebih mengarah pada upaya pembentukan perdamaian dan keamanan internasional di kawasan Timur Tengah. Hal ini tercermin dari tema besar yang diangkat Indonesia yakni "*Investment Peace*". Mengingat bahwa berdasarkan amanat dari UUD 1945 dan Dasasila Bandung, Indonesia harus berpartisipasi dalam upaya peningkatan perdamaian dunia dengan mengedepankan penggunaan cara-cara damai dan harus menghasilkan *Two States Solution* bagi setiap pihak yang bersengketa.

Melalui keanggotaan DK PBB, Indonesia telah banyak berupaya untuk menciptakan perdamaian Dunia. Terutama dalam proses tahapan resolusi konflik seperti *Peacemaking*, *Peacekeeping* dan *Peacebuilding*. Hal ini mengingat bahwa keyakinan Indonesia tentang konsepsi perdamaian yakni, perlu di bangun, dijaga

dan dipertahankan. Berdasar dari permasalahan ini Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai konflik serta menyertainya dengan proses-proses bina damai /*Peacebuilding*.

Selama menjadi anggota DK PBB, Indonesia memberikan banyak perhatiannya kedalam isu di kawasan Timur Tengah terutama terhadap isu Palestina, Suriah, Yaman, Libya dan Lebanon. Isu ini menjadi salah satu pembahasan utama yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan berkonsultasi bilateral dengan sejumlah negara mitra di kawasan tersebut seperti OKI, GGC, Kuwait dan Tunisia.

Sebagai salah satu negara yang terpilih untuk mewakili kawasan Asia dan Afrika, maka sudah sepantasnya Indonesia menaruh perhatian terhadap isu yang bergulir di kawasan Asia dan Afrika. Terutama di wilayah yang banyak dilanda konflik seperti Timur Tengah. Selama masa presidensi Indonesia di DK PBB, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling banyak dibahas pada setiap pertemuan di DK BB. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 43)

Beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, dan Palestina masih dalam proses perjuangan untuk mendapatkan perdamaian atas konflik yang sedang terjadi semenjak tahun 1900-an. Melihat akan hal ini, Indonesia selaku agen perdamaian dunia selalu menyorakan pentingnya mengedepankan dialog dan rekonsiliasi nasional melalui suatu proses politik yang *Nationally-Owned* dan *Nationally-led*, Inklusif dan Kredibel. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 43)

Di dalam setiap isu konflik, Indonesia selalu berbicara tentang pentingnya mengedepankan perlindungan terhadap penduduk sipil, terbukanya akses yang aman bagi bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap HAM serta perlunya proses bina damai (*Peacebuilding*) yang didukung dengan pembangunan yang berkelanjutan untuk tercapai *Sustaining Peace*. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 45)

Indonesia telah mengupayakan tindakan nyata untuk dilakukannya berbagai negosiasi dengan negara-negara yang terkait agar dapat menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah dengan mengedepankan upaya-upaya *Peacebuilding*. Pada tiga bulan pertama Indonesia di PBB setidaknya Indonesia telah mendapat beberapa capaian seperti melakukan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusiaan melalui UNRWA sebesar USD 1 juta, Selanjutnya Indonesia memprakarsai pelatihan penguatan kapasitas aparat pemerintah Palestina melalui pelatihan manajemen makro-ekonomi dan kebijakan fiskal, dimana agenda tersebut bertema "*International Workshop on Good Governance for Palestine: Macroeconomic Management and Fiscal Policy to Support Economic Growth*" yang dilaksanakan di Amman, Yordania pada 26-28 Maret 2019. Melalui kegiatan ini Indonesia berupaya membantu masyarakat Palestina untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keahlian yang memadai bagi para pemangku kepentingan Palestina guna mewujudkan kemandirian dalam membangun negara Palestina dikemudian hari, acara ini di hadiri oleh 21 peserta dari Palestina dan 3 orang dari Yordania.

Selanjutnya Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan kepada para diplomat Afganistan mengenai bina damai/*Peacebuilding* melalui promosi toleransi, pluralisme dan demokrasi. Dimana kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Ambon pada 15-24 Juli 2019, yang dimana dihadiri oleh 10 diplomat Afganistan dan pimpinan Kemlu dengan mengambil tema "*Indonesia and the Building of Peace Through the Promotion of Tolerance, Pluralism, and Democracy.*" Kegiatan ini merupakan upaya Indonesia untuk menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam mendukung proses damai dan pembangunan pasca konflik di Timur Tengah dan negara tetangga. Melalui kegiatan ini Indonesia bertujuan untuk mempromosikan bahwa Indonesia dapat menjadi *bridge builder* bagi perdamaian di dunia. Sehingga hal ini dapat dicontoh oleh negara lain agar dapat ikut menciptakan perdamaian di dunia terutama di wilayah Timur Tengah.

Kemudian pada masa presidensi DK PBB di bulan Mei, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan Briefing Dewan Keamanan PBB yang khusus membahas isu-isu penyelesaian konflik di Timur Tengah terutama pada isu Palestina, Yaman, dan Suriah. Dimana pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan tiga poin penting untuk isu-isu Timur Tengah yakni :

1. Perlindungan warga sipil Palestina
2. Kebutuhan untuk mengatasi kondisi kemanusiaan.
3. Proses perdamaian yang harus dilanjutkan.

Tidak hanya sampai di situ, selama masa presidensi Indonesia di bulan Mei, Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan *Sofa Talk*. Dimana kegiatan ini

merupakan gagasan Indonesia untuk melakukan pertemuan informal antar para wakil tetap anggota DK PBB. Acara ini dilaksanakan di PTRI New York, yang dimana pada pertemuan tersebut para wakil tetap membahas berbagai isu-isu yang sedang dibahas di sidang DK PBB seperti isu Suriah, Yaman, Palestina dan lainnya. Karena acara ini bersifat Informal maka pembicaraan para wakil tetap tidak direkam sehingga memberikan kesempatan luas dan bebas bagi para anggota untuk berdiskusi mencari jalan keluar pada isu-isu tertentu dan membangun keyakinan dan kepercayaan di antara para wakil tetap anggota DK PBB.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan audiensi dengan beberapa negara seperti Kuwait dan Tunisia untuk bekerjasama dalam upaya pemenuhan perdamaian di kawasan. Indonesia dan Kuwait telah melakukan audiensi dengan membahas isu regional dan kawasan yang menjadi perhatian kedua negara, terutama dalam konteks keanggotaan kedua negara di DK PBB selama tahun 2019. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 45)

Baik Indonesia maupun Kuwait, keduanya saling mengapresiasi atas saling support satu sama lain dalam pencalonan di DK PBB tahun 2018 lalu, dimana kedua negara sepakat untuk berkomitmen dalam memperkuat kerjasama menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, yang secara umum kedua negara menggarisbawahi pentingnya penguatan kerjasama dalam pemberantasan terorisme, *peacekeeping* serta *peacebuilding* di beberapa wilayah yang sedang berkonflik seperti Palestina, Yaman, Libya, dan Lebanon. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 51)

Disisi lain, Indonesia juga menjajaki kerjasama dengan Tunisia. Dimana pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Isu-isu yang secara khusus dibahas meliputi reformasi DK PBB, pasukan perdamaian PBB, *Peacebuilding*, perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, isu Palestina, isu Suriah, Yaman, Libya, Irak, Iran dan krisis di tengah negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC)*.

(GCC (*The Gulf Cooperation Council*) atau Dewan Kerjasama Teluk merupakan aliansi politik dan ekonomi enam negara jazirah arab yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Dan Uni Emirat Arab. (Diakses dari <http://www.moslemtoday.com/apa-itu-gcc/> - 25/04/2021 - 11.40 WIB))

Berkenaan dengan upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina, pihak Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi serta bekerja sama dengan pihak Tunisia termasuk dalam hal : (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 40)

- a. Mendorong penyelesaian isu Palestina – Israel melalui perundingan damai yang tetap berpijak pada prinsip *Two State Solution* dengan tidak ada alternatif lain.
- b. Mengedepankan perspektif hukum dan kemanusiaan dalam penyelesaian isu Palestina-Israel, berdasarkan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.
- c. Mendorong semua pihak untuk mengakhiri siklus kekerasan dan kebencian antara Palestina-israel serta menjajaki kembali *political will* untuk mencapai perdamaian abadi.

- d. Memastikan permasalahan Palestina tetap menjadi fokus DK PBB.
- e. Mencermati perkembangan persiapan “*Deal of the Century*” yang diprakarsai Amerika Serikat serta mengantisipasi dampak yang akan timbul.

Sebagai bentuk dari adanya kesepakatan dalam pertemuan tersebut, maka pihak Tunisia menyambut baik tawaran Indonesia untuk melakukan *political consultation* mengenai isu perhatian di DK PBB, dengan melibatkan langsung satuan kerja yang menangani isu-isu multilateral pada Kementerian Luar Negeri masing-masing negara. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 52)

Selain isu Palestina, Indonesia juga berusaha untuk menemukan solusi terbaik demi terciptanya perdamaian di wilayah Suriah, dimana untuk isu Suriah, Indonesia menaruh perhatian pada dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik. Dimana Indonesia terus berupaya untuk mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan akses bantuan kemanusiaan. Dimana Indonesia terus mendesak PBB dalam berbagai *briefing* untuk memberikan sanksi keras terhadap para pelaku kejahatan perang untuk segera diberikan hukuman.

Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk mengadopsi resolusi 2477 yang berisi tentang pembaruan mandat UNDOF (*United Nations Disengagement Observer Force*) di kawasan Suriah hingga tanggal 31 Desember 2019, hal ini bertujuan untuk memastikan misi PBB di Suriah tetap terawasi. Pada Isu Yaman, Indonesia dalam hal ini terus mendukung proses perdamaian Yaman melalui perjanjian Hudaidah yang

mempromosikan dialog rekonsiliasi antar pihak. Dimana Indonesia juga mendukung PBB melalui misinya untuk memantau implementasi Perjanjian Hudaidah melalui UNMHA (*United Nations support of the Hodeidah Agreement*). Dimana bentuk nyata aksi support Indonesia terlihat dengan pengiriman personel Indonesia pada misi UNHMA di Yaman. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 48)

Sedangkan untuk Isu Libya, Indonesia bersama negara lain sepakat untuk melakukan embargo senjata terhadap Libya karena mengingat kondisi disana pada tahun 2019 mulai memanas setelah terjadinya serangan udara di pusat penahan migran Tadjoura di pinggiran Tripoli yang menewaskan 53 orang dan melukai lebih dari 130 orang. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 49)

Sepanjang tahun 2019, Indonesia telah banyak memperlihatkan progres positif pada masyarakat dunia terhadap janji kampanyenya untuk menjadi *A true Partner for Peace*, Dimana seperti yang telah dijelaskan diatas, Indonesia menaruh perhatian lebih pada proses terbentuknya perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. (Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, 2019 : 11)

Penelitian tentang Peranan Indonesia dalam menciptakan *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah selama menjadi anggota Tidak tetap DK PBB sudah ada penelitian terdahulu yakni sebuah Jurnal Ilmiah yang berjudul “ Peranan Diplomat Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di PBB (Masa presidensi Indonesia di DK PBB Mei 2019) yang dibuat oleh Teuku Rezasyah yakni selaku dosen Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran pada tahun 2019. Dimana dalam tulisan tersebut lebih menjelaskan bagaimana upaya para diplomat Indonesia dalam

membahas isu Palestina di dalam sidang dan briefing DK PBB selama masa presidensi Indonesia di bulan Mei 2019. Dimana pembahasan tersebut lebih membahas tentang isu pembangunan pemukiman Israel yang ilegal di tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penelitian terdahulu lain mengenai Peranan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian juga pernah dibahas pada Jurnal ilmiah yang berjudul “Peranan Strategis Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa” yang ditulis oleh Sita Hidriyah selaku analis di pusat penelitian badan keahlian DPR RI pada tahun 2018. Dalam pembahasan jurnal ini lebih banyak membicarakan soal peranan strategis yang dapat digunakan Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yang mengarah pada upaya mencari solusi damai terhadap potensi konflik ataupun konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan secara umum.

Penelitian terdahulu yang lain juga terdapat pada sebuah jurnal ilmiah yang berjudul “Mendefinisikan kembali Peranan Indonesia di dewan keamanan PBB : Penjelajahan Teoritikal dan praktikal dalam mewujudkan perdamaian” oleh Kombes Pol. Jabison Purba, S.H selaku Tenaga ahli pengkaji muda bidang pertahanan dan keamanan LEMHANNAS RI. Di dalam pembahasannya jurnal ini lebih mengarah pada pandangan tentang penjabaran peranan yang Indonesia lakukan ketika menjabat sebagai Anggota tidak tetap DK PBB dengan memperhatikan keberhasilan Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan baik ditingkat nasional, kawasan maupun global, dan peranan Indonesia pada upaya

menciptakan perdamaian global melalui pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai misi perdamaian PBB di kawasan yang sedang konflik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas upaya pemerintah Indonesia dalam membangun perdamaian, Keamanan dan *Peacebuilding* Global terutama di kawasan Timur Tengah dengan juga membahas Isu Palestina. Sama-sama menjabarkan peranan Indonesia selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Serta sama-sama menaruh perhatian pada isu perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan di kawasan yang sedang mengalami konflik.

Perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu diatas ialah, kalau pada penelitian terdahulu unit analisisnya hanya berfokus pada isu Palestina, peranan yang dilakukan Indonesia untuk perdamaian secara global dan peranan Indonesia dalam mewujudkan praktik perdamaian dengan menggunakan berbagai konsep negosiasi, namun pada penelitian ini unit analisisnya lebih spesifik pada wilayah Timur Tengah yang membahas isu Palestina, Suriah, Libya dan Yaman. Kemudian penelitian ini juga menggunakan konsep *peacebuilding*, konsep kepentingan nasional, konsep resolusi konflik, konsep Peran nasional, dan konsep organisasi internasional dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada pembahasan. Maka dari itu untuk menganalisa lebih lanjut tentang peranan Indonesia terhadap proses perdamaian dan keamanan di Timur Tengah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **Peranan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Dalam Upaya Menciptakan Peacebuilding Di Kawasan Timur Tengah (2019-2020)**”

Adapun mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini ialah:

1. Organisasi Internasional

Dalam mata kuliah organisasi internasional, peneliti mempelajari tentang apa itu organisasi internasional dan bagaimana klasifikasi, peranan dan kedudukannya dalam pentas politik global. Dimana hal ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana peranan sebuah organisasi internasional dalam membahas isu global dan bagaimana kedudukannya dalam peranan tersebut. Sehingga peneliti lebih paham akan melihat fenomena yang terjadi pada kehadiran PBB dalam menjadi organisasi supranasional yang bertugas menjaga dan menciptakan perdamaian global.

2. Hukum Internasional

Melalui mata kuliah hukum internasional ini, peneliti belajar banyak tentang bagaimana pola perilaku negara dapat diatur dalam sebuah hukum yang mengikat, yang pada akhirnya menjadi pedoman negara-negara dalam berperan di panggung politik global. Pembelajaran mata kuliah ini sangat membantu peneliti dalam melihat bagaimana perilaku Indonesia yang dilandasi oleh hukum internasional dalam mengambil setiap langkah kebijakan di Dewan Keamanan PBB pada upaya *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah.

3. Analisis Politik Luar Negeri

Pada Mata Kuliah ini, peneliti menemukan banyak sekali pengetahuan mengenai bagaimana cara perumusan, penentuan sikap, dan bentuk dari arah

politik luar negeri suatu negara. Dimana hal ini sangat membantu peneliti dalam melihat arah pergerakan politik luar negeri Indonesia dari berbagai masa kepresidenan, terutama pada masa penentuan orientasi polugri Indonesia di era Presiden Jokowi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor :

Bagaimana Peranan Indonesia Dalam Upaya *Peacebuilding* Di Kawasan Timur Tengah Selama Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode (2019-2020)?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor :

1. Kepentingan apa yang hendak dicapai Indonesia melalui upaya *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dalam upaya *Peacebuilding* di Kawasan Timur Tengah?
4. Bagaimana perkembangan proses *Peacebuilding* di Timur Tengah ?

1.3 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik akan membahas peranan Indonesia dalam upaya *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah selama menjadi Anggota DK

PBB pada periode tahun 2019-2020. Mengingat akan wilayah Timur Tengah yang begitu luas dan hampir setiap negara-negara mengalami konflik, maka agar lingkup kajiannya jelas, penelitian ini berfokus pada isu-isu di Palestina, Libya, Yaman, dan Suriah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Melihat apa saja peranan Indonesia dalam proses *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah
2. Mencari kendala-kendala apa yang dihadapi Indonesia dalam upaya menciptakan *peacebuilding* di Kawasan Timur Tengah selama menjadi Anggota DK PBB.
3. Mencari tahu keuntungan apa saja yang hendak dicapai Indonesia selama memperjuangkan perdamaian di kawasan global
4. Dan menganalisa sejauh mana perkembangan *Peacebuilding* di Timur Tengah saat ini

1.4.2 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mencari data yang konkrit mengenai apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah, dengan memperhatikan aspek-aspek dan fenomena yang terjadi selama tahun 2019-2020

dimana Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa atau masyarakat umum apabila ingin mencari data mengenai peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah pada saat menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan keilmuan dalam bidang hubungan internasional pada fokus kajian kawasan Timur Tengah serta pada isu keamanan internasional dan Organisasi Internasional.